

Proses Pendidikan Pertama Bintara Dalam Pengawakan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan di Halmahera Selatan

Aditya Kurnia Rahman¹ Mitro Prihantoro² Marsono³

Program Studi Strategi Pertahanan Darat, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas
Pertahanan Republik Indonesia^{1,2,3}

Email: adityabandoke13@gmail.com¹ mitro.prihantoro@idu.ac.id² marsonopsk@yahoo.co.id³

Abstrak

Pengawakan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) di Halmahera Selatan memerlukan prajurit Bintara yang tidak hanya memiliki kemampuan dasar kemiliteran, tetapi juga kompetensi dalam mendukung pembangunan wilayah dan pembinaan teritorial. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara kompetensi lulusan Pendidikan Pertama Bintara (Dikmaba) dengan tuntutan tugas pada Yonif Teritorial Pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses rekrutmen calon peserta Dikmaba, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan pendidikan, serta menganalisis dampak pendidikan terhadap kualitas lulusan dalam mendukung tugas teritorial pembangunan di Halmahera Selatan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap empat informan yang terdiri atas Komandan Sekolah Calon Bintara, Kepala Urusan Operasi, Kepala Urusan Pengamanan, dan pelatih Sekolah Calon Bintara. Data dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses rekrutmen telah dilaksanakan secara sistematis melalui seleksi administrasi, kesehatan, kesamaptaaan jasmani, mental ideologi, dan psikologi, namun belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan spesifik Yonif TP. Faktor pendukung pendidikan meliputi sistem pendidikan yang terstruktur, tenaga pelatih yang berpengalaman, fasilitas yang memadai, dan kedisiplinan siswa, sedangkan faktor penghambat utama adalah keterbatasan waktu pendidikan, belum adanya materi teknis teritorial seperti pertanian, peternakan, dan perikanan dalam kurikulum, serta keterbatasan personel pengamanan. Pendidikan Dikmaba terbukti efektif dalam membentuk karakter militer, disiplin, dan kemampuan dasar keprajuritan, namun belum optimal dalam mempersiapkan prajurit untuk melaksanakan tugas teritorial pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian kurikulum dan penambahan alokasi waktu pendidikan agar kualitas lulusan lebih sesuai dengan kebutuhan pengawakan Yonif Teritorial Pembangunan di Halmahera Selatan.

Kata Kunci: Dikmaba, Yonif Teritorial Pembangunan, Rekrutmen, Kurikulum, Pembangunan Wilayah

Abstract

The manning of the Territorial Development Infantry Battalion (Yonif TP) in South Halmahera requires non-commissioned officers (NCOs) who not only possess basic military skills but also competencies in supporting regional development and territorial development. This research is motivated by the gap between the competencies of graduates of the Initial Non-Commissioned Officer Education (Dikmaba) and the demands of the Territorial Development Infantry Battalion. This research aims to analyze the recruitment process of prospective Dikmaba participants, identify factors that influence the implementation of education, and analyze the impact of education on the quality of graduates in supporting territorial development tasks in South Halmahera. The research uses a qualitative method with a phenomenological approach. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation with four informants consisting of the Commander of the NCO Candidate School, the Head of Operations Affairs, the Head of Security Affairs, and the NCO Candidate School trainer. Data were analyzed using the Miles, Huberman, and Saldaña model through the stages of data collection, data condensation, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study indicate that the recruitment process has been carried out systematically through administrative, health, physical fitness, mental ideology, and psychological selection, but has not fully accommodated the specific needs of Yonif TP. Supporting factors for education include a structured education system, experienced trainers, adequate

facilities, and student discipline, while the main inhibiting factors are limited educational time, the absence of territorial technical materials such as agriculture, animal husbandry, and fisheries in the curriculum, and limited security personnel. Dikmaba education has proven effective in shaping military character, discipline, and basic soldiering skills, but has not been optimal in preparing soldiers to carry out territorial development tasks. Therefore, curriculum adjustments and additional educational time allocation are needed so that the quality of graduates is more in line with the manning needs of the Territorial Development Yonif in South Halmahera.

Keywords: *Dikmaba, Territorial Development Infantry Battalion, Recruitment, Curriculum, Regional Development*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pertahanan negara merupakan salah satu pilar utama dalam keberlangsungan suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, pertahanan tidak semata-mata dipahami sebagai upaya militer sempit yang berorientasi pada peperangan konvensional, melainkan juga merupakan bagian integral dari strategi pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menegaskan bahwa pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata), dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Amanat konstitusional ini mencerminkan paradigma bahwa pertahanan negara merupakan tanggung jawab bersama yang harus dikelola secara sistematis, termasuk melalui pembangunan sumber daya manusia (SDM) militer yang berkualitas tinggi. Landasan hukum penyelenggaraan pertahanan negara semakin diperkuat melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Regulasi terbaru ini menjadi pijakan hukum yang mengatur penyelenggaraan TNI dalam menjalankan tugas pertahanan negara serta pembinaan SDM prajurit yang profesional dan berintegritas (Wardoyo et al., 2025). Dalam kerangka tersebut, pembinaan SDM militer bukan sekadar proses administratif, melainkan merupakan investasi strategis jangka panjang yang menentukan kesiapan dan kapabilitas TNI dalam menghadapi berbagai spektrum ancaman, baik yang bersifat militer maupun non-militer.

Paradigma pertahanan modern tidak dapat dipisahkan dari agenda pembangunan nasional, terutama di kawasan-kawasan strategis yang masih membutuhkan percepatan pembangunan. Pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan pembangunan, termasuk yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan keberlanjutannya, menempatkan pengembangan wilayah Indonesia Timur sebagai prioritas utama dalam rangka pemerataan pembangunan dan penguatan kedaulatan nasional (Bappenas, 2019). Dalam konteks ini, kehadiran dan kemampuan TNI khususnya Angkatan Darat di wilayah-wilayah perbatasan dan kepulauan terluar menjadi faktor determinan dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi berlangsungnya proses pembangunan. Sinergi antara pertahanan negara dan pembangunan nasional di wilayah timur Indonesia diwujudkan melalui penyelenggaraan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), salah satunya melalui kegiatan teritorial yang diemban oleh satuan-satuan TNI AD yang bertugas di berbagai daerah. Fungsi teritorial ini mencakup pembinaan teritorial, komunikasi sosial, serta bakti TNI dalam mendukung pembangunan daerah (Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yang telah direvisi dengan UU Nomor 3 Tahun 2025). Dengan demikian, prajurit TNI AD yang ditugaskan di wilayah seperti Halmahera Selatan tidak hanya bertugas mempertahankan wilayah dari

ancaman fisik, tetapi juga berperan aktif sebagai agen pembangunan yang memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, kualitas SDM prajurit yang ditempatkan di wilayah strategis menjadi sangat krusial. Prajurit yang bertugas di wilayah kepulauan dan perbatasan dituntut memiliki kompetensi yang komprehensif, tidak hanya kemampuan tempur, tetapi juga kecakapan sosial, kemampuan komunikasi lintas budaya, pemahaman tentang dinamika lokal, serta kapasitas untuk mendukung agenda pembangunan daerah. Peningkatan mutu SDM militer melalui pendidikan dan pelatihan yang terstruktur menjadi prasyarat mutlak untuk memenuhi tuntutan peran ganda tersebut. Kristiana et al. (2024) menegaskan bahwa profesionalisme TNI dalam era modern tidak hanya diukur dari kemampuan tempur, tetapi juga dari kapasitas prajurit dalam menjalankan tugas-tugas pemberdayaan masyarakat dan pembangunan wilayah, khususnya di daerah terpencil dan perbatasan. Kebijakan pembangunan yang menitikberatkan pada pemerataan antar-wilayah turut mendorong perlunya peningkatan kapabilitas TNI dalam mendukung akselerasi pembangunan di wilayah kepulauan timur. UU Nomor 3 Tahun 2025 menegaskan bahwa reposisi TNI dalam era reformasi tidak hanya mencakup profesionalisasi fungsi pertahanan, tetapi juga penguatan peran sosial TNI dalam mendukung pembangunan nasional. Oleh karena itu, paradigma pendidikan militer perlu diarahkan untuk menghasilkan prajurit yang tidak hanya tangguh secara fisik dan taktis, tetapi juga memiliki wawasan pembangunan dan kemampuan adaptasi tinggi terhadap berbagai kondisi lingkungan tugas, terutama di wilayah-wilayah strategis seperti Halmahera Selatan.

Halmahera Selatan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Maluku Utara yang memiliki posisi geostrategi sangat signifikan dalam peta pertahanan dan pembangunan nasional Indonesia. Secara geografis, wilayah ini terletak di bagian tenggara Kepulauan Maluku, berbatasan dengan Laut Maluku di bagian barat, Laut Halmahera di bagian utara, serta Laut Banda di bagian selatan. Posisi tersebut menempatkan Halmahera Selatan berada di jalur strategis yang menghubungkan antara kawasan Asia Tenggara dengan Pasifik, menjadikannya titik penting dalam dinamika geopolitik regional (BPS Halmahera Selatan, 2023). Dari sudut pandang pertahanan, wilayah ini merupakan bagian dari garis terdepan pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang melintas melalui Selat Makassar dan Laut Banda, memiliki arti strategis bagi lalu lintas pelayaran internasional. Kekayaan sumber daya alam Halmahera Selatan menjadikannya wilayah dengan nilai ekonomi strategis yang tinggi. Kabupaten ini merupakan salah satu daerah penghasil nikel terbesar di Indonesia, dengan cadangan mineral yang diperkirakan mencapai ratusan juta ton dan terus menjadi incaran investasi pertambangan nasional maupun internasional (Kementerian ESDM, 2022). Selain nikel, wilayah ini juga kaya akan sumber daya perikanan, kehutanan, dan potensi pariwisata bahari yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Buli yang sedang dalam proses pengembangan serta aktivitas industri pengolahan nikel di kawasan teluk Weda turut meningkatkan nilai strategis wilayah ini secara ekonomi. Namun demikian, kekayaan sumber daya alam yang berlimpah tersebut juga mengundang berbagai tantangan, termasuk potensi konflik kepentingan antara komunitas lokal, perusahaan pertambangan, dan kepentingan nasional.

Di balik potensinya yang besar, Halmahera Selatan menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang cukup kompleks. Karakteristik geografis sebagai wilayah kepulauan yang terdiri dari ratusan pulau kecil menjadikan konektivitas antar-wilayah sebagai persoalan fundamental yang menghambat percepatan pembangunan. Keterbatasan infrastruktur transportasi darat, minimnya jaringan jalan yang memadai, serta ketergantungan pada transportasi laut menyebabkan biaya logistik yang tinggi dan sulitnya pemerataan pelayanan

publik (Bappeda Halmahera Selatan, 2022). Kondisi ini diperparah oleh ketimpangan kualitas sumber daya manusia antara wilayah perkotaan dan pedesaan kepulauan, di mana angka kemiskinan dan indeks pembangunan manusia di beberapa pulau terpencil masih jauh di bawah rata-rata nasional. Dari perspektif keamanan wilayah, Halmahera Selatan juga tidak lepas dari berbagai tantangan yang berpotensi mengganggu stabilitas. Wilayah ini pernah mengalami konflik sosial horizontal yang cukup serius pada awal era reformasi, dan meskipun kondisi telah relatif kondusif, potensi gesekan antar-kelompok masyarakat masih perlu diantisipasi dengan serius (Sulaiman, 2019). Di samping itu, wilayah perairan yang luas dengan pengawasan yang masih terbatas menjadi celah bagi berbagai aktivitas ilegal, termasuk penangkapan ikan ilegal oleh kapal-kapal asing, penyelundupan barang, hingga potensi pergerakan kelompok-kelompok yang dapat mengancam keamanan nasional. Aktivitas tambang yang massif juga berpotensi menimbulkan konflik agraria antara perusahaan dan masyarakat adat yang menggantungkan hidup pada tanah dan laut warisan leluhur mereka.

Tantangan kesejahteraan dan pembangunan di Halmahera Selatan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terpadu antara instansi pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta aparat keamanan. Dalam konteks ini, keberadaan satuan TNI AD khususnya batalyon infanteri teritorial pembangunan memiliki peran yang melampaui fungsi keamanan konvensional. Satuan tersebut diharapkan mampu menjadi mitra pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan di wilayah-wilayah terpencil yang sulit dijangkau oleh pelayanan sipil biasa. Peran ganda ini mengharuskan prajurit TNI AD yang bertugas di Halmahera Selatan untuk memiliki kapabilitas yang jauh lebih kompleks dibandingkan prajurit yang bertugas di wilayah dengan kondisi yang lebih mapan. Azwar et al. (2021) menegaskan bahwa efektivitas satuan TNI dalam mendukung pembangunan di daerah terpencil sangat ditentukan oleh kualitas dan kesiapan personelnnya, termasuk pemahaman tentang karakteristik lokal dan kemampuan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat setempat. Urgensi kehadiran satuan TNI AD yang kuat dan berkualitas di Halmahera Selatan semakin mengemuka seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan dinamika sosial-politik di kawasan tersebut. Pertumbuhan industri nikel yang pesat telah mengundang masuknya ribuan tenaga kerja dari berbagai daerah, menciptakan kompleksitas demografis yang membutuhkan penanganan keamanan yang cermat dan berkeadilan. Pada saat yang sama, dinamika geopolitik regional di Pasifik Barat yang semakin intensif menuntut kesiapan pertahanan yang optimal di wilayah kepulauan strategis ini. Dengan demikian, kualitas prajurit TNI AD yang mengawaki satuan teritorial pembangunan di Halmahera Selatan menjadi variabel kritis yang menentukan kemampuan negara dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut secara simultan.

Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) merupakan satuan TNI AD yang relatif baru dalam struktur organisasi militer Indonesia. Pembentukan satuan ini didasarkan pada kebutuhan nyata akan kehadiran militer yang tidak hanya mampu mengamankan wilayah tetapi juga secara aktif berkontribusi dalam proses pembangunan daerah, terutama di kawasan-kawasan terpencil yang masih membutuhkan sentuhan negara secara lebih intensif. Dalam konteks Halmahera Selatan, pembentukan Yonif TP merupakan respons strategis terhadap kompleksitas tantangan yang dihadapi wilayah tersebut, yang membutuhkan pendekatan militer yang adaptif dan berorientasi pembangunan. Namun demikian, pembentukan satuan baru ini segera dihadapkan pada tantangan mendasar yang belum sepenuhnya terantisipasi, yakni persoalan pengawakan personel yang berkualitas dan siap pakai. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa Yonif TP yang baru dibentuk di Halmahera Selatan mengalami kondisi di mana sebagian besar personelnnya terutama di tingkat Bintara merupakan lulusan Pendidikan Pertama Bintara (Dikmaba) yang masih sangat minim pengalaman lapangan. Kondisi ini menciptakan tantangan serius dalam operasionalisasi

satuan, mengingat Bintara merupakan tulang punggung satuan yang bertanggung jawab langsung dalam memimpin pelaksanaan tugas di tingkat paling taktis serta melakukan pembinaan terhadap prajurit tamtama di lapangan (Wardoyo et al., 2025). Minimnya pengalaman para Bintara baru ini menjadi persoalan struktural yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui masa orientasi singkat di satuan, melainkan membutuhkan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan yang menghasilkan mereka.

Anomali kualitas lulusan Dikmaba mulai tampak manakala para Bintara muda tersebut dihadapkan pada realitas tugas di lapangan yang jauh berbeda dari apa yang telah mereka pelajari selama pendidikan. Dalam konteks Yonif TP, para Bintara tidak hanya dituntut menguasai teknis militer dasar, tetapi juga harus mampu menjalankan fungsi teritorial yang kompleks, seperti pembinaan komunikasi sosial dengan tokoh masyarakat dan adat, pemetaan potensi wilayah, analisis dinamika sosial-politik lokal, serta perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bakti TNI. Kemampuan-kemampuan ini, pada kenyataannya, tidak atau belum cukup diakomodasi dalam kurikulum Dikmaba yang berlaku saat ini. Hasil pengamatan awal menunjukkan bahwa kurikulum Dikmaba lebih berorientasi pada pembentukan kemampuan militer umum seperti bela diri militer, menembak, taktik perorangan, dan wawasan kebangsaan daripada mengembangkan kecakapan khusus yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi teritorial pembangunan (Maslebu, 2024). Kesenjangan antara output Dikmaba dengan kebutuhan riil Yonif TP juga tampak dalam aspek psikologis dan mental prajurit. Tugas di wilayah kepulauan terpencil seperti Halmahera Selatan menuntut ketahanan mental yang tinggi, kemampuan beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang ekstrem, serta kesiapan menghadapi isolasi geografis dalam jangka waktu yang lama. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tekanan psikologis selama proses pendidikan Dikmaba, jika tidak dikelola dengan baik, justru dapat melemahkan resiliensi mental prajurit dalam jangka panjang (Wardoyo et al., 2025). Lebih dari itu, metode pendidikan yang masih cenderung berorientasi pada *teacher-centered* di mana instruktur mendominasi proses pembelajaran sementara peserta didik bersifat pasif dinilai kurang efektif dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah yang sangat dibutuhkan oleh seorang Bintara dalam situasi nyata di lapangan.

Persoalan kurikulum Dikmaba yang belum memuat kompetensi khusus teritorial juga berimplikasi pada kemampuan Bintara baru dalam mengoperasikan peralatan dan teknologi pendukung tugas modern. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah mengubah karakteristik tugas militer secara fundamental, termasuk dalam domain teritorial. Seorang Bintara Yonif TP idealnya mampu mengoperasikan sistem peta digital, melakukan komunikasi melalui berbagai platform yang relevan, serta memanfaatkan teknologi survei sederhana untuk mendukung pemetaan wilayah dan potensi ancaman. Namun, keterbatasan sarana pelatihan dan minimnya integrasi teknologi pendidikan dalam proses Dikmaba menyebabkan para lulusan tidak memiliki kecakapan tersebut secara memadai (Wardoyo et al., 2025). Sistem pendukung keputusan berbasis teknologi yang diterapkan dalam proses seleksi juga masih perlu dikembangkan agar dapat lebih efektif mengidentifikasi calon peserta didik yang memiliki potensi untuk menjadi Bintara yang siap menghadapi tantangan tugas khusus (Sutejo & Hasan, 2024). Analisis kesenjangan (*gap analysis*) antara output pendidikan Dikmaba dengan tuntutan tugas riil di Yonif TP Halmahera Selatan mengungkapkan problematika yang bersifat sistemik dan multi-dimensional. Kesenjangan ini tidak semata-mata terjadi karena kurangnya kompetensi individual para lulusan, tetapi lebih pada ketidaksesuaian antara desain kurikulum yang berlaku dengan profil kompetensi yang dibutuhkan oleh satuan teritorial pembangunan di wilayah strategis. Rassa dan Lestari (2021) menegaskan bahwa sistem seleksi dan pendidikan yang tidak selaras dengan kebutuhan operasional nyata akan menghasilkan

personel yang secara teknis lulus pendidikan namun tidak benar-benar siap menghadapi tuntutan tugas di lapangan. Kondisi inilah yang secara konsisten ditemukan dalam evaluasi kinerja awal Bintara lulusan Dikmaba yang ditempatkan di Yonif TP Halmahera Selatan.

Dari dimensi kompetensi teknis-taktis, lulusan Dikmaba memang telah memiliki bekal dasar militer yang cukup memadai. Namun, untuk konteks Yonif TP, kompetensi tersebut perlu dilengkapi dengan keterampilan-keterampilan khusus yang berhubungan dengan tugas teritorial. Kesenjangan pertama yang paling kentara adalah ketiadaan pembekalan dalam hal teknik komunikasi sosial (Komsos) dengan berbagai elemen masyarakat, terutama tokoh adat dan agama yang memiliki pengaruh besar di komunitas-komunitas kepulauan Maluku. Bintara Yonif TP yang efektif harus mampu membangun kepercayaan masyarakat dalam waktu singkat, memahami dinamika adat dan kearifan lokal, serta menjadi mediator yang dapat diterima oleh semua pihak dalam situasi konflik sosial. Kemampuan-kemampuan ini membutuhkan pembekalan khusus yang saat ini belum terdapat dalam struktur kurikulum Dikmaba (Sulaiman, 2019; Wardoyo et al., 2025). Kesenjangan kedua berkaitan dengan kemampuan operasi di lingkungan kepulauan (*amphibious awareness*) dan penguasaan navigasi maritim dasar. Mengingat Halmahera Selatan merupakan wilayah kepulauan, mobilitas satuan sangat bergantung pada kemampuan operasi laut terbatas. Seorang Bintara Yonif TP idealnya memiliki kemampuan dasar navigasi, penggunaan alat komunikasi laut, pemahaman tentang kondisi perairan dan cuaca lokal, serta prosedur keselamatan operasi laut. Kurikulum Dikmaba yang saat ini berlaku belum mengakomodasi pembekalan tersebut secara memadai, sehingga para lulusan yang ditempatkan di Yonif TP harus menjalani serangkaian pelatihan tambahan di satuan yang pada gilirannya menguras waktu dan sumber daya satuan itu sendiri (Azwar et al., 2021). Kondisi ini menciptakan beban ganda bagi satuan, yang harus menjalankan misi operasional sekaligus mendidik ulang personelnnya sendiri.

Kesenjangan ketiga muncul dalam aspek manajemen dan kepemimpinan taktis. Sebagai Bintara, seorang prajurit dituntut untuk segera mampu memimpin regu atau peleton dalam berbagai jenis operasi, baik tempur maupun non-tempur. Namun dalam konteks Yonif TP, kepemimpinan taktis ini mencakup dimensi yang lebih luas dari sekadar komando tempur, yakni kemampuan memimpin tim dalam kegiatan pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat, dan penyuluhan. Penelitian Maslebu (2024) menunjukkan bahwa pelatihan kerja yang berorientasi pada konteks tugas spesifik dan peningkatan kompetensi yang berkelanjutan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kerja prajurit, di mana pelatihan kerja yang relevan menjadi faktor dominan dalam membentuk efektivitas personel TNI AD. Temuan ini menegaskan bahwa ketidaksesuaian antara pelatihan yang diterima dengan konteks tugas nyata akan secara langsung menurunkan efektivitas prajurit di lapangan. Kesenjangan keempat berkaitan dengan sistem rekrutmen dan seleksi awal calon peserta Dikmaba. Saat ini, proses seleksi belum secara eksplisit mempertimbangkan kebutuhan spesifik satuan-satuan dengan fungsi khusus seperti Yonif TP. Rassa dan Lestari (2021) menunjukkan bahwa sistem seleksi berbasis kualitas dan kebutuhan operasional dapat secara signifikan meningkatkan efektivitas penyediaan personel. Sutejo dan Hasan (2024) menambahkan bahwa penerapan sistem pendukung keputusan berbasis teknologi dalam proses seleksi dapat membantu menghasilkan penilaian yang lebih objektif, efisien, dan transparan. Dengan demikian, gap tidak hanya terjadi pada tahap pendidikan, tetapi bermula sejak proses rekrutmen yang belum diorientasikan pada profil kompetensi yang dibutuhkan oleh satuan-satuan khusus seperti Yonif TP.

Akumulasi kesenjangan yang telah diuraikan di atas menciptakan urgensi yang tidak dapat ditunda untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pendidikan Dikmaba, khususnya dalam konteks pengawakan Yonif TP di Halmahera Selatan. Urgensi ini semakin mengemuka mengingat bahwa kondisi ketidaksiapan prajurit Bintara bukan hanya persoalan

individual yang dapat diselesaikan melalui mentoring di satuan, melainkan merupakan persoalan sistemik yang berakar pada desain pendidikan yang belum responsif terhadap tuntutan tugas modern. Evaluasi yang dimaksud bukan semata-mata bersifat penilaian terhadap kinerja lembaga pendidikan, melainkan suatu upaya ilmiah untuk mengidentifikasi secara komprehensif faktor-faktor yang menentukan efektivitas pendidikan Dikmaba dalam menghasilkan Bintara yang benar-benar siap pakai untuk mengawaki Yonif TP. Penelitian ini penting dilakukan karena tiga alasan fundamental. Pertama, Halmahera Selatan merepresentasikan model tantangan yang dihadapi oleh banyak wilayah kepulauan strategis di Indonesia Timur, perpaduan kompleks antara kekayaan sumber daya alam, kerentanan sosial, tantangan geografis, dan kebutuhan pertahanan yang tinggi. Hasil penelitian ini karenanya memiliki relevansi yang jauh melampaui konteks lokal Halmahera Selatan dan dapat menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan pendidikan militer di wilayah-wilayah serupa. Kedua, pembentukan Yonif TP sebagai satuan dengan misi ganda pertahanan dan pembangunan merupakan inovasi kelembagaan yang belum banyak mendapat perhatian akademis, sehingga penelitian ini berpotensi mengisi kekosongan literatur yang ada. Ketiga, perubahan regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI membuka jendela kebijakan untuk melakukan reformasi menyeluruh dalam sistem pendidikan militer, dan penelitian ini dapat memberikan dasar empiris yang kuat untuk mendukung reformasi tersebut.

Evaluasi proses Dikmaba yang dilakukan dalam penelitian ini difokuskan pada dua aspek utama yang saling berkaitan: pertama, relevansi dan kecukupan kurikulum pendidikan dalam membekali peserta didik dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh Bintara Yonif TP; dan kedua, efektivitas metode pembelajaran yang diterapkan dalam proses pendidikan tersebut. Wardoyo et al. (2025) menegaskan bahwa penerapan kurikulum yang adaptif, metode pembelajaran interaktif, dan integrasi teknologi pendidikan telah terbukti mampu meningkatkan mutu pendidikan militer secara signifikan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengidentifikasi gap spesifik dalam kurikulum Dikmaba dan merumuskan rekomendasi konkret untuk menjadikan kurikulum tersebut lebih responsif terhadap profil tugas Bintara Yonif TP. Aspek rekrutmen dan seleksi juga menjadi fokus penting dalam penelitian ini. Kualitas output pendidikan tidak dapat dioptimalkan tanpa kualitas input yang memadai. Dalam konteks ini, penelitian akan mengkaji apakah sistem rekrutmen Dikmaba saat ini telah dirancang untuk mengidentifikasi calon peserta didik yang memiliki potensi dan karakter yang sesuai dengan tuntutan tugas Bintara Yonif TP. Rassa dan Lestari (2021) menunjukkan bahwa sistem seleksi berbasis kualitas dan kebutuhan operasional dapat meningkatkan efektivitas penyediaan personel secara signifikan. Sutejo dan Hasan (2024) menambahkan bahwa integrasi teknologi dalam proses seleksi dapat menghasilkan penilaian yang lebih objektif dan efisien. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, penelitian ini akan mengusulkan model rekrutmen yang lebih terdiferensiasi yakni yang mempertimbangkan kebutuhan spesifik satuan-satuan dengan fungsi khusus dalam sistem distribusi penempatan lulusan.

Pada akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) yang dapat diimplementasikan oleh Komando Pendidikan dan Latihan TNI AD (Kodiklat TNI AD) maupun satuan-satuan terkait dalam rangka meningkatkan kesiapan lulusan Dikmaba untuk mengawaki Yonif TP di Halmahera Selatan. Rekomendasi tersebut mencakup aspek adaptasi kurikulum, pengembangan metode pembelajaran yang lebih berorientasi pada kompetensi spesifik, penguatan sistem rekrutmen, serta penyelarasan antara proses pendidikan dengan kebutuhan nyata satuan di lapangan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat terwujud suatu siklus perbaikan berkelanjutan dalam

sistem pendidikan Dikmaba yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesiapan dan profesionalitas TNI AD dalam menjalankan tugas pertahanan sekaligus pembangunan di wilayah-wilayah strategis Indonesia Timur, termasuk Halmahera Selatan yang memiliki nilai strategis tidak ternilai bagi keutuhan dan kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rumusan Masalah: Bagaimana proses pendidikan pertama Bintara Angkatan Darat untuk pengawakan Yonif Teritorial Pembangunan di Halmahera Selatan? Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pendidikan pertama Bintara dalam rangka pengawakan Yonif Teritorial Pembangunan? Bagaimana dampak proses pendidikan terhadap kualitas hasil didik dalam mendukung tugas Teritorial Pembangunan di Halmahera Selatan? Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: Menganalisis proses pendidikan pertama Bintara yang akan mengawaki Yonif Teritorial Pembangunan di Halmahera Selatan. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pendidikan pertama Bintara dalam pengawakan Yonif Teritorial Pembangunan. Menganalisis dampak proses pendidikan terhadap kualitas hasil didik dalam mendukung tugas Teritorial Pembangunan di Halmahera Selatan.

Hasil Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Wardoyo et al. (2025) membahas “Perspektif Pendidikan dan Pengajaran dalam Meningkatkan Kualitas Lulusan Pendidikan Dasar Militer di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan locus di Pusat Pendidikan Infanteri. Fokus utama penelitian tersebut adalah bagaimana strategi kurikulum, metode pembelajaran interaktif, dan evaluasi berkelanjutan dapat meningkatkan mutu lulusan Dikdasmil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala seperti keterbatasan sarana dan dominasi metode teacher-centered masih menjadi masalah, sehingga diperlukan pembelajaran yang adaptif serta integrasi teknologi pendidikan. Dibandingkan dengan penelitian ini, sama-sama membahas pendidikan militer dengan metode kualitatif. Namun, perbedaannya terletak pada locus dan fokus. Wardoyo menitikberatkan pada kurikulum dan strategi pembelajaran Dikdasmil, sedangkan penelitian ini berfokus pada efektivitas pendidikan Dikmaba dalam mengawaki Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan di Halmahera Selatan.
2. Penelitian Widodo et al. (2024) berjudul “Optimalisasi Staltahmil Puspomal Guna Meningkatkan Standar Operasional dan Keamanan dalam Rangka Mendukung Tugas TNI AL”. Penelitian ini menyoroti fungsi Instalasi Tahanan Militer Puspomal sebagai tempat pembinaan prajurit TNI AL yang bermasalah hukum. Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk menganalisis kelemahan SOP, kurangnya kompetensi pengawak, serta keterbatasan sarana dan prasarana. Hasil penelitian menekankan perlunya peningkatan kualitas SDM, legalitas SOP, dan dukungan fasilitas agar Staltahmil mampu mendukung tugas TNI AL secara optimal. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan, yakni sama-sama menggunakan metode kualitatif serta membahas SDM TNI. Namun, perbedaannya adalah fokus Widodo terletak pada optimalisasi fungsi tahanan militer, sedangkan penelitian ini menekankan efektivitas pendidikan Dikmaba sebagai pengawak batalyon infanteri teritorial pembangunan.
3. Penelitian Sutejo & Hasan (2024) berjudul “Penerapan Metode VIKOR pada Pengambilan Keputusan Seleksi Prajurit TNI AD untuk Pendidikan Bintara”. Penelitian ini mengembangkan sistem pendukung keputusan berbasis metode VIKOR untuk membantu seleksi prajurit Tamtama yang akan melanjutkan pendidikan Bintara di Kodam XVII/Cenderawasih. Kriteria seleksi mencakup kesehatan, akademik, psikologi, dan jasmani. Hasilnya menunjukkan bahwa metode VIKOR mampu membuat proses seleksi lebih objektif, efisien, dan akurat. Perbandingannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas pendidikan bintangara dalam lingkup TNI AD. Namun, Sutejo dan Hasan menitikberatkan pada

sistem seleksi berbasis teknologi, sementara penelitian ini fokus pada efektivitas proses pendidikan Dikmaba setelah seleksi berlangsung, khususnya dalam kaitannya dengan pengawakan batalyon infanteri teritorial pembangunan.

4. Penelitian Kurniadi et al. (2023) berjudul “Kualitas Pelayanan Pendidikan Bintara Kepolisian Negara Republik Indonesia di SPN Lido Polda Metro Jaya”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik Weight Mean Score (WMS) untuk menganalisis kualitas pelayanan pendidikan bintanga Polri. Fokus penelitian adalah lima dimensi pelayanan yaitu bukti fisik, reliabilitas, daya tanggap, jaminan, dan empati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pendidikan bintanga Polri berada pada kategori baik, meskipun masih ada aspek yang perlu ditingkatkan. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus dan pendekatan. Kurniadi meneliti kualitas pelayanan pendidikan kepolisian dengan pendekatan kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan lebih menekankan efektivitas pendidikan Dikmaba dalam menyiapkan SDM militer TNI AD untuk mengisi batalyon infanteri teritorial pembangunan.
5. Penelitian Rassa & Lestari (2021) berjudul “Analisis Pola Rekrutmen Prajurit TNI AL Tahun 2020 pada Satuan Pendidikan Sorong dalam Rangka Penyediaan Prajurit Koarmada III”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan locus di Satdik Sorong serta beberapa panitia daerah seperti Lantamal X Jayapura, Lantamal XI Merauke, dan Lantamal XIV Sorong. Fokusnya adalah pola rekrutmen calon prajurit TNI AL, baik Caba PK maupun Catam PK, dalam rangka pemenuhan kebutuhan personel Koarmada III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola rekrutmen sudah berjalan baik meskipun masih menghadapi kendala teknis dan administratif. Kesamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menyoroti pembentukan SDM militer melalui jalur pendidikan dasar. Namun, perbedaannya adalah penelitian Rassa berfokus pada sistem rekrutmen TNI AL, sementara penelitian ini berfokus pada proses pendidikan Dikmaba serta kontribusinya terhadap pengawakan batalyon infanteri teritorial pembangunan di Halmahera Selatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam pengalaman, pandangan, serta makna yang dialami oleh para pihak yang terlibat dalam proses pendidikan bintanga sebagai bagian dari upaya pengawakan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan di Halmahera Selatan. Menurut Creswell & Poth (2018), penelitian kualitatif fenomenologi berfokus pada penggalian dan pengungkapan esensi dari pengalaman hidup subjek penelitian, sehingga peneliti dapat menangkap realitas yang dialami secara langsung oleh partisipan. Pendekatan fenomenologi dipandang relevan karena pendidikan bintanga bukan hanya sekadar proses pembelajaran dan pelatihan militer formal, tetapi juga menyangkut pengalaman sosial, persepsi, serta nilai yang dimiliki oleh calon prajurit, instruktur, pejabat militer, dan masyarakat sekitar. Dengan fenomenologi, peneliti berupaya menggali “makna” yang terkandung dalam pengalaman mereka, baik dalam konteks kebijakan pendidikan militer, dinamika sosial di lingkungan pelatihan, maupun harapan yang menyertai pembentukan dan pengawakan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan.

Penelitian ini dilaksanakan di Rindam Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, dengan fokus pada area yang menjadi pusat pelaksanaan serta persiapan pendidikan bintanga dalam rangka pengawakan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan strategis bahwa Maluku Tengah memiliki nilai geostrategis yang penting, baik dari sisi pertahanan maupun pembangunan wilayah. Selain itu, daerah ini menjadi prioritas dalam program penguatan teritorial TNI, khususnya melalui pembentukan

dan pengawakan satuan baru yang diharapkan mampu mengoptimalkan potensi lokal. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode utama yang sesuai dengan pendekatan kualitatif fenomenologi, yakni:

1. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*). Wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh pemahaman langsung mengenai pengalaman, pandangan, dan persepsi para informan terkait dengan proses pendidikan bintara dalam pengawakan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan panduan pertanyaan yang fleksibel, sehingga memungkinkan peneliti untuk menggali lebih jauh informasi yang muncul selama percakapan. Metode ini sejalan dengan pendapat Kvale & Brinkmann (2015) bahwa wawancara kualitatif merupakan sarana untuk memahami dunia kehidupan subjek penelitian melalui percakapan yang bermakna.
2. Observasi Lapangan. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung proses pembelajaran dan pelatihan dalam pendidikan bintara, termasuk interaksi antara instruktur dengan peserta didik, pola disiplin yang diterapkan, serta dinamika sosial yang berkembang selama proses pendidikan. Observasi dilakukan secara partisipatif pasif, di mana peneliti hadir di lokasi namun tidak ikut serta dalam kegiatan. Melalui observasi, peneliti dapat merekam fenomena nyata yang mendukung temuan dari hasil wawancara.
3. Studi Dokumentasi. Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap data, berupa peraturan resmi TNI, kurikulum dan silabus pendidikan bintara, laporan kegiatan pendidikan, data jumlah peserta, hingga arsip administratif terkait pengawakan batalyon. Sugiyono (2019) menegaskan bahwa dokumentasi dapat menjadi sumber penting dalam penelitian kualitatif karena berfungsi sebagai bukti tertulis yang memperkuat hasil wawancara dan observasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses Pendidikan Pertama Bintara Angkatan Darat untuk Pengawakan Yonif Teritorial Pembangunan di Halmahera Selatan

Berdasarkan keterangan seluruh informan, proses pendidikan diawali melalui rekrutmen calon peserta di Secaba Rindam XV/Pattimura yang dilaksanakan secara umum melalui tahapan baku yang meliputi seleksi administrasi, pemeriksaan kesehatan, uji kesamaptaaan jasmani, seleksi mental ideologi, dan pemeriksaan psikologi. Mekanisme ini secara umum telah memenuhi standar dasar untuk menjangkau calon prajurit yang memiliki kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, terdapat kesenjangan yang signifikan antara mekanisme rekrutmen yang ada dengan kebutuhan khusus Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan. Rekrutmen belum dilakukan secara selektif berdasarkan proyeksi penempatan di Yonif TP, sehingga tidak ada penyaringan khusus untuk mengetahui kemampuan dasar calon siswa di bidang pertanian, peternakan, atau perikanan yang relevan dengan tugas Yonif TP. Hal ini menyebabkan lulusan Dikmaba yang akan mengawaki Yonif Teritorial Pembangunan di Halmahera Selatan tidak mendapatkan pembekalan yang spesifik sesuai kebutuhan satuan tersebut.

Faktor-faktor yang Mendukung dan Menghambat Pelaksanaan Pendidikan Pertama Bintara

Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan Pendidikan Dikmaba adalah: Pertama, sistem pendidikan yang terstruktur dengan kurikulum yang ditetapkan oleh Komando Atas memberikan landasan yang jelas bagi pelaksanaan pendidikan. Kedua, ketersediaan tenaga pelatih yang berpengalaman dan profesional menjadi modal utama dalam mentransfer kemampuan kepada prajurit siswa. Ketiga, sarana dan prasarana latihan yang memadai di Secaba Rindam XV/Pattimura mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan secara efektif. Keempat, dukungan komando atas dalam bentuk kebijakan dan anggaran menjadi faktor

penting bagi kelangsungan pendidikan. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan Pendidikan Dikmaba adalah: Pertama, kurikulum Dikmaba yang masih berpedoman pada kurikulum pendidikan Infanteri murni belum mengakomodasi kebutuhan materi teritorial pembangunan, khususnya pertanian, peternakan, dan perikanan. Kedua, waktu pendidikan yang singkat (2 bulan) dinilai tidak cukup untuk membekali prajurit secara komprehensif, baik untuk kemampuan tempur maupun kemampuan teritorial pembangunan. Ketiga, perbedaan latar belakang siswa dari berbagai daerah membutuhkan penyesuaian pembinaan yang lebih intensif. Keempat, keterbatasan personel pengamanan dan dinamika kegiatan pendidikan yang padat menjadi tantangan tersendiri.

Dampak Proses Pendidikan terhadap Kualitas Hasil Didik dalam Mendukung Tugas Teritorial Pembangunan

Secara keseluruhan, proses pendidikan Dikmaba telah berhasil membentuk prajurit yang memiliki kemampuan dasar militer yang baik, meliputi kemampuan tempur infanteri, fisik yang prima, disiplin, dan mental keprajuritan. Transformasi sikap dari sipil menjadi prajurit yang disiplin dan hierarkis merupakan capaian positif yang konsisten diakui oleh seluruh informan. Namun demikian, dari aspek kualitas untuk mendukung tugas Teritorial Pembangunan di Halmahera Selatan, terdapat kesenjangan yang nyata. Lulusan Dikmaba belum dibekali dengan kompetensi teknis di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan yang merupakan inti dari tugas Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan. Akibatnya, prajurit yang ditempatkan di Yonif TP harus memperoleh pengetahuan dan keterampilan teknis tersebut secara mandiri di lapangan, yang berpotensi mengurangi efektivitas pelaksanaan tugas pembangunan wilayah di Halmahera Selatan. Dengan demikian, diperlukan revisi kurikulum Dikmaba secara mendesak untuk memasukkan materi kemampuan teritorial pembangunan, didukung dengan perpanjangan masa pendidikan agar seluruh kompetensi yang dibutuhkan dapat diberikan secara optimal kepada prajurit siswa.

Pembahasan

Proses Pendidikan Pertama Bintara Angkatan Darat Untuk Pengawakan Yonif Teritorial Pembangunan di Halmahera Selatan

Proses pendidikan diawali dengan rekrutmen calon peserta Pendidikan Bintara (Dikmaba) merupakan tahapan yang bersifat fundamental dan strategis dalam membangun kualitas sumber daya manusia TNI AD, khususnya dalam konteks pengawakan Yonif TP di Halmahera Selatan. Rekrutmen bukan sekadar prosedur administratif, melainkan merupakan gerbang awal penyaringan calon prajurit yang akan mengemban tanggung jawab besar di wilayah yang memiliki nilai geopolitik dan sosial tinggi. Hal ini sejalan dengan pandangan Werther dan Davis (1996) bahwa sumber daya manusia adalah pegawai yang siap, mampu, dan siaga dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks militer, kesiapan tersebut harus dibangun sejak tahap paling awal, yaitu rekrutmen, agar prajurit yang dihasilkan benar-benar mampu mengemban tugas yang dibebankan kepadanya. Dengan demikian, kualitas proses rekrutmen secara langsung berkorelasi dengan kualitas personel yang pada akhirnya akan mengawaki satuan teritorial di lapangan. Secara substantif, rekrutmen personel bintara di lingkungan Secaba dilaksanakan dengan mempertimbangkan tiga aspek utama, yaitu kemampuan dasar calon prajurit bintara, kebutuhan satuan pengguna, serta kondisi dan ketersediaan waktu pendidikan. Pendekatan ini mencerminkan orientasi yang tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga operasional dan kontekstual. Relevansi antara kualifikasi calon peserta dengan kebutuhan nyata satuan di lapangan menjadi pertimbangan yang tidak bisa diabaikan, mengingat Yonif Teritorial di Halmahera Selatan menuntut prajurit yang tidak hanya

unggul secara taktis-teknis, tetapi juga mampu melaksanakan fungsi pembinaan wilayah. Hal ini sejalan dengan temuan Rassa dan Lestari (2021) yang menekankan bahwa sistem seleksi berbasis kualitas dan kebutuhan operasional dapat meningkatkan efektivitas penyediaan personel secara signifikan. Ketika rekrutmen dilakukan dengan memperhatikan keselarasan antara profil calon prajurit dan tuntutan tugas satuan pengguna, maka lulusan yang dihasilkan akan lebih siap secara operasional sejak hari pertama bertugas.

Mekanisme seleksi yang diterapkan dalam rekrutmen Dikmaba bersifat berlapis dan komprehensif, mencakup seleksi administrasi, pemeriksaan kesehatan, uji kesamaptaaan jasmani, penilaian mental ideologi, serta pemeriksaan psikologi. Setiap tahapan dirancang untuk menyaring calon peserta secara bertingkat sehingga hanya individu yang benar-benar memenuhi standar yang ditetapkan yang dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Penggunaan pendekatan seleksi yang multidimensional ini sangat penting mengingat profil prajurit yang dibutuhkan bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga memiliki kestabilan mental, integritas moral, dan kemampuan adaptasi yang tinggi. Sutejo dan Hasan (2024) menegaskan bahwa sistem seleksi yang dirancang secara objektif, efisien, dan transparan mampu menghasilkan keputusan penerimaan yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks ini, penerapan tahapan seleksi yang terstandar merupakan upaya institusional untuk meminimalkan subjektivitas dan memastikan bahwa setiap calon peserta yang lolos seleksi memang layak secara holistik untuk mengikuti pendidikan militer.

Kriteria penerimaan yang ditetapkan meliputi kondisi kesehatan yang baik, kemampuan fisik yang memadai, mental yang kuat, sikap disiplin, loyalitas tinggi, serta kemampuan adaptasi terhadap kehidupan militer dan keragaman lingkungan penugasan. Kriteria kemampuan adaptasi ini secara khusus relevan dengan kondisi wilayah Halmahera Selatan yang memiliki karakteristik geografis dan sosial yang beragam. Prajurit yang bertugas di wilayah tersebut tidak hanya dihadapkan pada tantangan medan yang berat, tetapi juga pada keragaman budaya dan dinamika sosial masyarakat yang memerlukan kepekaan dan fleksibilitas tinggi. Hal ini berkaitan erat dengan fungsi Batalyon Teritorial Pembangunan yang oleh Setyanto (2024) digambarkan sebagai satuan yang tidak hanya melaksanakan fungsi pertahanan fisik, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di tingkat lokal. Dengan demikian, penetapan kriteria adaptabilitas dalam proses rekrutmen merupakan langkah strategis yang menyelaraskan kebutuhan individu prajurit dengan tuntutan peran satuan di wilayah yang kompleks.

Dalam tataran pelaksanaan, keberhasilan rekrutmen sangat ditopang oleh mekanisme koordinasi antarlembaga yang berjalan secara rutin dan terstruktur melalui rapat perencanaan pendidikan dan evaluasi kegiatan. Koordinasi ini memastikan sinkronisasi antarsatuan terkait dan berfungsi sebagai instrumen pemantauan yang berkesinambungan. Tanpa koordinasi yang efektif, keterpaduan antara rencana rekrutmen dan kebutuhan riil satuan pengguna akan sulit terwujud. Dalam konteks yang lebih luas, pola koordinasi semacam ini sejalan dengan prinsip manajemen sumber daya manusia yang menekankan bahwa pengelolaan SDM bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk membantu organisasi mencapai tujuannya (Sutrisno, 2011). Oleh karena itu, koordinasi yang solid antara Secaba sebagai lembaga pendidikan dengan satuan pengguna di lapangan menjadi prasyarat utama agar rekrutmen menghasilkan personel yang tepat sasaran, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Meskipun demikian, proses rekrutmen dan pendidikan Dikmaba tidak terlepas dari tantangan yang bersifat struktural maupun teknis. Tantangan paling mendasar adalah heterogenitas latar belakang peserta didik yang mencakup perbedaan sosial, budaya, pendidikan, dan kebiasaan hidup pra-militer. Kondisi ini menyebabkan tingkat adaptasi setiap individu terhadap disiplin militer sangat bervariasi, sehingga memerlukan pendekatan

pembinaan yang lebih personal dan intensif. Lebih jauh, keterbatasan waktu pendidikan memperberat tantangan tersebut, karena transformasi pola pikir dari individu sipil menjadi prajurit yang disiplin, hierarkis, dan loyal merupakan proses yang membutuhkan durasi, intensitas, dan metode yang tepat. Wardoyo et al. (2025) mencatat bahwa kendala serupa juga ditemukan dalam pendidikan militer secara umum, di mana dominasi metode teacher-centered dan keterbatasan sarana menjadi hambatan dalam mengoptimalkan proses pembentukan prajurit yang adaptif dan kompeten. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penyempurnaan tidak hanya pada tahap rekrutmen awal, tetapi juga pada desain kurikulum dan metode pembelajaran yang lebih responsif terhadap keragaman profil peserta didik.

Secara keseluruhan, Hasil Penelitian menunjukkan bahwa proses rekrutmen calon peserta Dikmaba untuk pengawakan Yonif Teritorial Pembangunan di Halmahera Selatan telah dilaksanakan melalui mekanisme yang terstruktur, berlapis, dan berorientasi pada pemenuhan standar operasional satuan. Namun demikian, efektivitas rekrutmen tidak bisa dinilai semata-mata dari terpenuhinya prosedur seleksi, melainkan juga dari sejauh mana output rekrutmen tersebut mampu menghasilkan prajurit yang siap secara fisik, mental, dan nilai untuk menjalankan peran teritorial yang kompleks. Maslebu (2024) mengingatkan bahwa pelatihan kerja dan peningkatan kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kesiapan prajurit, di mana pelatihan menjadi faktor dominan dalam membentuk efektivitas personel TNI AD. Oleh karena itu, rekrutmen yang berkualitas perlu diikuti dengan proses pendidikan yang adaptif dan berkelanjutan agar investasi awal dalam seleksi dapat menghasilkan prajurit Bintara yang benar-benar mampu menjadi tulang punggung Yonif Teritorial di Halmahera Selatan, sekaligus berkontribusi nyata terhadap stabilitas keamanan dan pembangunan wilayah di kawasan timur Indonesia.

Faktor-Faktor Yang Mendukung Dan Menghambat Pelaksanaan Pendidikan Bintara

Keberhasilan pelaksanaan Dikmaba dalam rangka pengawakan Yonif Teritorial Pembangunan di Halmahera Selatan tidak dapat dilepaskan dari interaksi dinamis antara berbagai faktor pendukung dan penghambat yang bekerja secara simultan dalam sistem pendidikan militer. Faktor-faktor tersebut mencakup dimensi kelembagaan, sumber daya manusia, infrastruktur, kurikulum, hingga kondisi individual peserta didik. Pemahaman yang komprehensif terhadap faktor-faktor ini menjadi prasyarat penting untuk menilai sejauh mana pelaksanaan Dikmaba telah berjalan secara efektif dan relevan dengan tuntutan tugas yang diemban oleh satuan teritorial. Hal ini sejalan dengan pandangan Sutrisno (2011) yang menegaskan bahwa betapapun majunya teknologi dan tersedianya modal, tanpa pengelolaan sumber daya manusia yang tepat, organisasi akan sulit mencapainya. Dalam konteks pendidikan militer, pengelolaan SDM yang dimaksud mencakup tidak hanya peserta didik, tetapi juga seluruh komponen pendukung penyelenggaraan pendidikan, mulai dari tenaga pelatih, fasilitas, hingga sistem kurikulum yang diterapkan.

Dari sisi faktor pendukung, aspek kelembagaan menjadi fondasi yang paling mendasar. Keberadaan sistem pendidikan yang terstruktur memberikan kepastian alur dan tahapan pembinaan sehingga setiap aspek kompetensi prajurit dapat dibina secara sistematis dan terukur. Tenaga pelatih yang berpengalaman dan profesional menjadi aset strategis yang tidak tergantikan karena kualitas pembinaan sangat bergantung pada kompetensi serta dedikasi para pendidik yang membimbing siswa secara langsung. Fasilitas latihan yang memadai turut memberikan landasan material bagi terlaksananya seluruh program latihan sesuai dengan standar yang ditetapkan, sementara dukungan komando atas memperkuat legitimasi dan keberlanjutan program pendidikan secara institusional. Kondisi ini mencerminkan bahwa secara umum, prasyarat penyelenggaraan pendidikan militer yang baik telah terpenuhi di

lingkungan Secaba. Sari et al. (2024) mengemukakan bahwa pendidikan militer yang efektif mensyaratkan kesiapan mental, moral, dan profesionalisme yang hanya dapat dibentuk melalui lingkungan pendidikan yang terstruktur dengan dukungan tenaga pendidik yang kompeten dan sarana prasarana yang memadai. Dengan demikian, keberadaan faktor-faktor pendukung tersebut merupakan kondisi yang diperlukan, meskipun belum cukup untuk menjamin terpenuhinya seluruh tuntutan kompetensi yang dibutuhkan oleh Yonif Teritorial.

Selain faktor kelembagaan, aspek ketertiban dan pengawasan internal juga merupakan faktor pendukung yang berperan signifikan dalam menciptakan iklim pendidikan yang kondusif. Keberadaan aturan yang jelas dan pengawasan yang ketat merupakan fondasi utama yang memungkinkan proses pendidikan berjalan secara tertib dan terarah. Kesadaran siswa dalam mematuhi peraturan yang berlaku menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai disiplin militer telah mulai terbentuk sejak awal masa pendidikan. Ketiga unsur tersebut, yaitu aturan, pengawasan, dan kesadaran siswa, bersifat saling menguatkan sehingga menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi pembentukan karakter prajurit. Kedisiplinan siswa dalam mengikuti seluruh kegiatan pendidikan juga menjadi indikator keberhasilan awal dalam pembentukan karakter militer. Suryanto (2022) menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan militer tidak hanya ditentukan oleh kemampuan fisik dan teknis, tetapi juga oleh aspek mental dan moral yang menjadi fondasi profesionalisme prajurit. Dalam hal ini, pengawasan yang konsisten dan penegakan aturan yang tegas merupakan instrumen pembentukan karakter yang tidak dapat dikesampingkan dalam proses pendidikan Dikmaba.

Di sisi lain, terdapat sejumlah faktor penghambat yang secara nyata membatasi efektivitas pelaksanaan pendidikan Dikmaba. Faktor penghambat pertama dan paling menonjol adalah keterbatasan waktu pendidikan yang tidak sebanding dengan luasnya materi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Keterbatasan waktu ini berdampak langsung pada kedalaman materi yang dapat diberikan kepada setiap peserta didik, sekaligus mempersulit upaya transformasi menyeluruh dari individu sipil menjadi prajurit yang disiplin, hierarkis, dan loyal. Wardoyo et al. (2025) dalam penelitiannya mencatat bahwa salah satu tantangan utama dalam pendidikan militer di Indonesia adalah kesenjangan antara rancangan kurikulum dan pelaksanaannya di lapangan, yang antara lain disebabkan oleh keterbatasan waktu dan dominasi metode pembelajaran yang kurang adaptif. Kondisi serupa terjadi dalam konteks Dikmaba, di mana keterbatasan waktu menjadi hambatan struktural yang tidak mudah diatasi tanpa peninjauan mendasar terhadap desain program pendidikan secara keseluruhan.

Faktor penghambat kedua yang bersifat substansial adalah kesenjangan antara kurikulum yang berlaku dengan tuntutan spesifik tugas Yonif Teritorial Pembangunan. Prajurit yang bertugas di Yonif Teritorial tidak hanya dituntut menguasai kemampuan tempur Infanteri, tetapi juga harus memiliki keahlian teknis di bidang pertanian, peternakan, dan konstruksi yang mendukung fungsi pembangunan wilayah. Namun kenyataannya, materi-materi tersebut belum tercantum dalam kurikulum Dikmaba yang sedang berjalan. Kondisi ini merupakan kesenjangan yang signifikan mengingat fungsi Batalyon Teritorial Pembangunan, sebagaimana dijelaskan oleh Setyanto (2024), bukan hanya mengembangkan kapasitas pertahanan fisik, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di tingkat lokal. Anggraini dan Supratiwi (2025) menambahkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh satuan teritorial mencakup pendampingan program pertanian, penyuluhan kesehatan, pelatihan keterampilan pemuda, hingga pembangunan infrastruktur melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). Dengan demikian, ketiadaan materi teknis operasional teritorial dalam kurikulum Dikmaba merupakan kelemahan mendasar yang perlu segera ditangani melalui perancangan ulang kurikulum yang berbasis kebutuhan operasional satuan pengguna.

Faktor penghambat ketiga berkaitan dengan keterbatasan personel pengamanan yang berdampak pada efektivitas pengawasan, terutama dalam kondisi kepadatan kegiatan pendidikan yang berlangsung secara simultan di berbagai lini. Dinamika kegiatan yang padat menuntut kesiapan personel pengamanan yang memadai agar setiap aktivitas dapat terpantau secara optimal. Dalam perspektif manajemen sumber daya manusia, kondisi ini mencerminkan ketidakseimbangan antara beban kerja dengan kapasitas personel yang tersedia. Ndraha (1999) mengemukakan bahwa SDM yang berkualitas tinggi adalah SDM yang mampu menciptakan nilai kompetitif dan inovatif melalui pemanfaatan energi tertinggi berupa kecerdasan dan kreativitas. Dalam konteks ini, keterbatasan jumlah personel pengamanan harus dikompensasi dengan peningkatan kualitas dan kompetensi personel yang ada, sehingga efektivitas pengawasan dapat tetap terjaga meskipun dengan sumber daya yang terbatas. Faktor penghambat keempat yang perlu mendapat perhatian adalah kondisi kesehatan sebagian peserta didik yang belum sepenuhnya optimal selama menjalani proses pendidikan. Meskipun secara umum kesiapan dan kemampuan peserta didik Dikmaba dinilai sudah baik, kehadiran sejumlah siswa yang mengalami permasalahan kesehatan menjadi faktor penghambat yang bersifat individual namun tetap berdampak pada ketercapaian standar kompetensi secara kelompok. Kondisi kesehatan yang tidak optimal secara langsung membatasi keikutsertaan penuh siswa dalam berbagai kegiatan belajar mengajar, sehingga potensi yang dimiliki tidak dapat berkembang secara maksimal. Maslebu (2024) menegaskan bahwa pelatihan kerja dan peningkatan kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kesiapan prajurit, sehingga gangguan apapun yang membatasi keikutsertaan peserta dalam proses pelatihan akan berimplikasi langsung pada kualitas kompetensi yang dihasilkan. Oleh karena itu, pemantauan dan penanganan kondisi kesehatan prajurit secara proaktif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen penyelenggaraan pendidikan Dikmaba yang efektif.

Secara keseluruhan, temuan mengenai faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pendidikan Dikmaba ini memberikan gambaran tentang kondisi aktual penyelenggaraan pendidikan militer dalam konteks pengawakan Yonif Teritorial Pembangunan di Halmahera Selatan. Meskipun fondasi kelembagaan berupa sistem pendidikan yang terstruktur, tenaga pelatih yang berpengalaman, dan fasilitas yang memadai telah tersedia, terdapat kesenjangan yang nyata antara output pendidikan yang dihasilkan dengan tuntutan kompetensi yang dibutuhkan satuan di lapangan. Purnomo et al. (2021) mengingatkan bahwa transformasi peran teritorial TNI AD diperlukan agar sesuai dengan dinamika globalisasi dan tuntutan zaman tanpa mengurangi esensi utama pembinaan teritorial. Transformasi ini harus dimulai dari hulu, yaitu pada tahap pendidikan pembentukan seperti Dikmaba, melalui penyempurnaan kurikulum yang secara eksplisit mengakomodasi materi teknis operasional teritorial, penguatan kapasitas personel pengamanan, serta penyempurnaan mekanisme pemantauan kesehatan peserta didik. Dengan demikian, Dikmaba dapat benar-benar berfungsi sebagai instrumen dalam mencetak prajurit Bintara yang tidak hanya tangguh secara militer, tetapi juga kompeten dalam menjalankan fungsi pembangunan yang menjadi inti dari peran Yonif Teritorial Pembangunan di Halmahera Selatan.

Dampak Proses Pendidikan Terhadap Kualitas Hasil Didik dalam Mendukung Tugas Teritorial Pembangunan di Halmahera Selatan

Secara sebagai sistem pendidikan pembentukan prajurit Bintara TNI AD pada dasarnya dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi militer yang komprehensif, meliputi kemampuan fisik, keterampilan taktis, serta karakter dan mental yang kokoh. Dampak dari proses pendidikan ini dapat ditelaah dari berbagai dimensi, mulai dari perubahan karakter dan sikap peserta didik, kualitas kompetensi yang dihasilkan, hingga relevansi bekal yang

diberikan terhadap tuntutan tugas yang sesungguhnya dihadapi prajurit setelah bertugas di lapangan. Dalam konteks pengawakan Yonif Teritorial Pembangunan di Halmahera Selatan, penilaian terhadap dampak pendidikan Dikmaba menjadi semakin kompleks karena satuan ini mengemban fungsi ganda, yaitu fungsi pertahanan sekaligus fungsi pembangunan wilayah. Hal ini sejalan dengan pandangan Setyanto (2024) yang menjelaskan bahwa melalui kegiatan pembinaan teritorial, TNI AD tidak hanya mengembangkan kapasitas pertahanan fisik, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di tingkat lokal. Oleh sebab itu, dampak pendidikan Dikmaba tidak cukup hanya diukur dari standar kemiliteran konvensional, tetapi juga harus dievaluasi dari perspektif kesiapan prajurit dalam menjalankan peran pembangunan yang menjadi inti dari fungsi Yonif Teritorial Pembangunan.

Dari sisi pembentukan karakter dan sikap, pendidikan pertama bintanga telah menunjukkan dampak yang nyata dan dapat diamati secara langsung. Proses pendidikan yang berbasis disiplin militer terbukti mampu mengubah orientasi nilai dan perilaku peserta didik dari pola pikir sipil menuju mentalitas militer yang disiplin dan hierarkis. Disiplin menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan pendidikan karena setiap kegiatan pendidikan mensyaratkan ketertiban dan kepatuhan terhadap aturan. Tanpa disiplin yang kokoh, tujuan pembentukan prajurit yang berkualitas tidak akan dapat tercapai, terlepas dari sebaik apapun kurikulum dan fasilitas yang tersedia. Suryanto (2022) menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan militer tidak hanya ditentukan oleh kemampuan fisik dan teknis semata, tetapi juga oleh aspek mental dan moral yang menjadi fondasi profesionalisme prajurit. Dalam hal ini, perubahan sikap dari individu sipil menjadi prajurit yang disiplin dan bermental militer merupakan dampak nyata yang terukur dari proses pendidikan, mencakup perubahan cara berpikir, orientasi nilai, dan pola perilaku yang kini lebih selaras dengan tuntutan kehidupan militer. Pencapaian transformasi karakter ini merupakan bukti bahwa Dikmaba telah menjalankan fungsinya sebagai agen pembentukan identitas prajurit secara efektif.

Selain dampak pada aspek karakter, proses pendidikan yang bersifat bertahap dan terstruktur juga memberikan dampak positif pada penguasaan kompetensi dasar keprajuritan. Struktur pendidikan yang dimulai dari pendidikan dasar keprajuritan sebagai fondasi, dilanjutkan dengan latihan taktis, latihan lapangan, serta pembinaan fisik dan mental yang berkelanjutan, mencerminkan pendekatan yang sistematis dalam membangun kompetensi prajurit secara progresif. Metode pelatihan yang diterapkan mencakup simulasi taktik bertempur secara nyata, latihan taktis untuk meningkatkan kemampuan fisik dan taktis dalam menghadapi situasi pertempuran, serta pelatihan fisik intensif seperti lari jarak jauh, *push-up*, *sit-up*, *chin-up*, dan berenang untuk memastikan daya tahan dan kekuatan fisik yang prima. Rangkaian metode tersebut secara keseluruhan bertujuan membentuk prajurit yang tangguh secara fisik, terampil secara taktis, dan kuat secara mental. Purwantoro et al. (2024) menjelaskan bahwa struktur pendidikan militer yang berjenjang dan terprogram diharapkan dapat menghasilkan personel yang adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Dengan demikian, pendekatan bertahap yang diterapkan dalam Dikmaba merupakan praktik terbaik yang sejalan dengan prinsip-prinsip pendidikan militer modern, dan dampaknya terhadap penguasaan kompetensi dasar keprajuritan dapat dinilai secara umum sudah memenuhi standar yang ditetapkan.

Namun demikian, evaluasi yang lebih kritis terhadap dampak Dikmaba mengungkapkan adanya kesenjangan yang signifikan antara kompetensi yang dihasilkan dengan tuntutan tugas operasional yang sesungguhnya dihadapi prajurit di lapangan. Lulusan secara umum memiliki kemampuan dasar keprajuritan yang baik, namun masih perlu peningkatan pada aspek kemampuan teritorial untuk mendukung tugas pembangunan wilayah. Kesenjangan ini bersumber dari orientasi kurikulum yang masih terpusat sepenuhnya pada kemampuan

tempur Infanteri, tanpa memasukkan materi teknis operasional yang dibutuhkan untuk mendukung fungsi pembangunan wilayah. Secara spesifik, materi pertanian, peternakan, dan perikanan yang merupakan inti dari fungsi pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan sama sekali tidak tercantum dalam kurikulum yang berlaku saat ini. Wardoyo et al (2025) mencatat bahwa salah satu tantangan utama dalam pendidikan militer di Indonesia adalah adanya kesenjangan antara rancangan kurikulum dan pelaksanaannya di lapangan, yang antara lain disebabkan oleh kurangnya integrasi antara materi pendidikan dengan kebutuhan nyata di lapangan. Temuan serupa juga terjadi dalam konteks Dikmaba di Rindam XV/Pattimura, di mana kesenjangan kurikulum bukan hanya bersifat teknis, melainkan bersifat sistemik karena materi yang dibutuhkan memang tidak pernah dimasukkan ke dalam kurikulum yang ada.

Ketidakrelevanan kurikulum tersebut memberikan dampak yang sangat konkret terhadap kesiapan prajurit dalam menjalankan tugas di Halmahera Selatan. Anggraini dan Supratiwi (2025) menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh satuan teritorial mencakup pendampingan program pertanian, penyuluhan kesehatan, pelatihan keterampilan pemuda, hingga pembangunan infrastruktur melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). Dengan demikian, prajurit yang ditugaskan di Yonif Teritorial Pembangunan di Halmahera Selatan secara nyata dituntut untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang pertanian, peternakan, serta perikanan sebagai bekal dalam menjalankan fungsi pembangunan tersebut. Ketika bekal pengetahuan tersebut tidak diberikan selama masa pendidikan Dikmaba, maka prajurit yang bertugas menghadapi kesenjangan kompetensi yang harus ditutup melalui proses pembelajaran informal di lapangan. Kondisi ini tidak hanya mengurangi efektivitas pelaksanaan tugas, tetapi juga membebani prajurit dengan tuntutan belajar di tengah-tengah pelaksanaan tugas operasional yang sudah padat. Maslebu (2024) menegaskan bahwa pelatihan kerja dan peningkatan kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kesiapan prajurit, sehingga ketiadaan bekal kompetensi yang relevan sejak tahap pendidikan awal akan berdampak langsung pada efektivitas personel di lapangan.

Persoalan kesenjangan kurikulum tersebut semakin diperparah oleh tidak berfungsinya mekanisme evaluasi dan revisi kurikulum di tingkat lembaga pendidikan. Meskipun tujuan perencanaan kurikulum secara resmi telah diarahkan pada pembentukan prajurit yang memiliki kemampuan teritorial, profesional, dan humanis, namun proses evaluasi berkala dan revisi yang semestinya menjadi mekanisme penyesuaian terhadap kondisi aktual dan kebutuhan lapangan ternyata tidak dilaksanakan di Dikmaba Rindam XV/Pattimura. Absennya mekanisme evaluasi dan revisi di tingkat lembaga pendidikan inilah yang menyebabkan kesenjangan antara tujuan kurikulum dengan isi kurikulum yang diterapkan terus berlanjut tanpa koreksi yang memadai. Hanita dan Mayerni (2025) menekankan bahwa kurikulum pendidikan militer secara berkelanjutan harus mengalami pembaruan agar relevan dengan tantangan global dan tuntutan operasional yang terus berkembang. Dalam konteks ini, ketidakaktifan mekanisme evaluasi kurikulum di tingkat satuan pendidikan merupakan kelemahan institusional yang serius karena mengakibatkan akumulasi kesenjangan antara pendidikan yang diberikan dengan kebutuhan satuan pengguna yang terus berubah. Tanpa mekanisme umpan balik yang aktif dari satuan pengguna kepada lembaga pendidikan, perbaikan kurikulum hanya akan bersifat reaktif dan tidak sistematis.

Secara keseluruhan, dampak pendidikan Dikmaba terhadap kualitas hasil didik dalam mendukung tugas teritorial dan pembangunan di Halmahera Selatan dapat disimpulkan bersifat positif pada dimensi pembentukan karakter dan kompetensi dasar keprajuritan, namun masih belum memadai pada dimensi kesiapan prajurit untuk menjalankan fungsi pembangunan wilayah. Keberhasilan dalam membentuk prajurit yang disiplin, bermental

militer, dan terampil secara taktis merupakan capaian yang patut diapresiasi. Akan tetapi, ketiadaan materi teknis operasional teritorial dalam kurikulum, dikombinasikan dengan tidak berfungsinya mekanisme evaluasi kurikulum di tingkat lembaga pendidikan, menyebabkan output pendidikan belum sepenuhnya relevan dengan tuntutan tugas Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan. Salewang (2013) mengingatkan bahwa hubungan harmonis antara aparat teritorial dengan masyarakat hanya dapat tercipta apabila prajurit yang bertugas memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pembangunan masyarakat setempat. Oleh karena itu, diperlukan langkah perbaikan meliputi pengembangan kurikulum yang secara eksplisit memasukkan materi kemampuan teritorial dan pembangunan, penambahan alokasi waktu pendidikan yang proporsional, serta pengaktifan kembali mekanisme evaluasi dan revisi kurikulum secara berkala di tingkat lembaga pendidikan. Hanya dengan langkah-langkah tersebut, pendidikan Dikmaba dapat benar-benar memberikan dampak yang optimal dalam mencetak prajurit Bintara yang tidak hanya tangguh secara militer, tetapi juga kompeten sebagai agen pembangunan yang mampu berkontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan stabilitas wilayah Halmahera Selatan.

KESIMPULAN

Proses pendidikan pertama Bintara Angkatan Darat melalui tahapan awal yaitu rekrutmen calon peserta yang dilaksanakan melalui tahapan seleksi administrasi, kesehatan, kesamaptaan jasmani, mental ideologi, dan psikologi dengan kriteria utama yang mencakup kesehatan, kemampuan fisik, mental, disiplin, dan loyalitas. Proses seleksi telah berjalan secara terstruktur, namun keberagaman latar belakang calon peserta dan keterbatasan waktu pendidikan masih menjadi tantangan dalam membentuk prajurit yang disiplin, hierarkis, dan loyal secara merata. Faktor pendukung meliputi sistem pendidikan yang terstruktur, tenaga pelatih yang berpengalaman, fasilitas yang memadai, serta kedisiplinan siswa. Adapun faktor penghambat utama adalah keterbatasan waktu pendidikan, ketiadaan materi teknis teritorial seperti pertanian, peternakan, dan perikanan dalam kurikulum, serta keterbatasan personel pengamanan. Kesenjangan antara kurikulum yang berlaku dengan tuntutan tugas Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan menjadi permasalahan mendasar yang memerlukan penanganan segera. Pendidikan Dikmaba berhasil membentuk karakter militer, kedisiplinan, dan kemampuan dasar keprajuritan lulusan. Namun kesiapan prajurit dalam menjalankan tugas teritorial dan pembangunan di Halmahera Selatan masih belum optimal karena kurikulum yang berlaku masih berorientasi pada kemampuan tempur Infanteri murni dan tidak memuat materi yang relevan dengan fungsi Batalyon Teritorial Pembangunan. Diperlukan revisi kurikulum secara menyeluruh disertai penambahan alokasi waktu pendidikan agar kualitas lulusan lebih sesuai dengan tuntutan tugas di lapangan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menyampaikan saran kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut.

- a. Danrindam XV/Pattimura perlu segera menyesuaikan kurikulum pendidikan bintangara dengan menambahkan materi pertanian, peternakan, perikanan dan kesehatan disertai penguatan mekanisme evaluasi kurikulum secara berkala.
- b. Personel TNI AD perlu secara proaktif meningkatkan kompetensi teknis di bidang teritorial pembangunan melalui pelatihan mandiri maupun program pembinaan satuan.
- c. Penelitian Lanjutan perlu dilaksanakan untuk mengkaji efektivitas model kurikulum terintegrasi antara kemampuan tempur Infanteri dan kemampuan teknis teritorial pembangunan, serta kajian komparatif dengan satuan teritorial di wilayah lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, M. P., & Supratiwi, S. (2025). Evaluasi Program TNI Manunggal Membangun Desa di Desa Sijunggung Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024. *Journal of Politic and Government Studies*, 14(2), 431–451.
- Azwar, A., & Suryana, M. J. (2021). Dwifungsi TNI dari Masa ke Masa. *Jurnal Academia Praja*, 4(1), 154-179.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publication.
- Hanita, M., Mayerni, R., & Thaher, I. *Rethinking National Resilience: Rekonstruksi Konsepsi Ketahanan Nasional*. Penerbit Widina.
- Kristiana, L., Siregar, P., & Burhanudin, S. (2024). Prajurit yang Profesional Menuju TNI Modern Pada Era Reformasi. *Jurnal Dwija Kusuma*, 12(1), 33-44.
- Kurniadi, D., Seran, G. G., & Ramdani, F. T. (2023). Kualitas pelayanan pendidikan bintanga kepolisian negara republik Indonesia di Sekolah Polisi Negara (SPN) Lido Polda Metro Jaya. *Karimah Tauhid*, 2(5), 2272–2283.
- Kvale, S., & Brinkmann, S. (2015). *InterViews: Learning the craft of qualitative research interviewing* (3rd ed.). Sage Publication.
- Maslebu, A. A. (2024). Analisis pelatihan kerja, kompetensi dan efektivitas kerja terhadap pengembangan SDM prajurit TNI AD AJENDAM I/BB (Skripsi, Fakultas Sosial Sains).
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Sage Publication.
- Ndraha, T. (1999). *Pengantar teori pengembangan sumber daya manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods* (4th ed.). Sage Publication.
- Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pendidikan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.
- Purnomo, W., Widjojo, A., Mardiyanta, A., & Zaidun, M. (2021). *Pengembalian Fungsi Teritorial dari TNI ke Pemerintahan Daerah*. Airlangga University Press.
- Rassa, A. Y. K. L., & Lestari, A. (2021). Analisis pola rekrutmen prajurit TNI AL tahun 2020 pada satuan pendidikan Sorong dalam rangka penyediaan prajurit Koarmada III. *Rekayasa*, 14(2), 263–271.
- Salewangang, M. R. (2013). Modal sosial dalam pembangunan TNI (Studi pemetaan dan pemanfaatan modal sosial di Batalyon Infanteri 712 Wiratama–Manado). *Governance*, 5(1).
- Setyanto, E., Hidayat, T., & Diyah, I. A. (2024). Manajemen organisasi.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sutejo, H., & Hasan, P. (2024). Penerapan metode VIKOR pada pengambilan keputusan seleksi prajurit TNI AD untuk pendidikan Bintangara. *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika dan Komunikasi*, 5(1), 1033–1047.
- Sutrisno, E. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Prananda Media Group.
- Topatimasang, R. (2016). *Orang-orang kalah: Kisah penyingkiran masyarakat adat Kepulauan Maluku*. INSISTPress.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 30 ayat (2)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Wardoyo, S., Wasliman, I., & Sauri, R. S. (2025). Perspektif pendidikan dan pengajaran dalam meningkatkan kualitas lulusan pendidikan dasar militer di Indonesia. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 14(2), 2803–2818.



- Werther, W. B., & Davis, K. (1996). *Human resource and personnel management* (5th ed.). McGraw-Hill.
- Widodo, H., Lestari, D. A., MM, M. P., & Solehudin, U. (2024). Optimalisasi Staltahmil Puspomal guna meningkatkan standar operasional dan keamanan dalam rangka mendukung tugas TNI AL. *Jurnal Ilmiah Kajian Keangkatanlautan*, 6(3), 84–92.